

Pemuda dan Tantangannya

BABARI*

PENGANTAR

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tahun 1985 sebagai Tahun Pemuda Internasional. Hal ini berarti secara khusus PBB memberikan perhatian yang besar kepada para pemuda di seluruh dunia. Tema Tahun Pemuda Internasional yang dicanangkan oleh PBB adalah: Partisipasi, Pembangunan dan Perdamaian. Bagaimana menjabarkan tema itu agar sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing negara diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan para pemudanya.

Di negara kita gema Tahun Pemuda Internasional itu juga bergaung. Pemerintah cq. Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga juga membentuk Panitia Nasional Tahun Pemuda Internasional di Indonesia. Salah satu programnya yang sudah terlaksana adalah menyelenggarakan Pertemuan Pengusaha Muda ASEAN di Jakarta tanggal 12-15 Agustus yang baru lalu. Panitia nasional juga merangsang agar masing-masing himpunan/kelompok pemuda melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsi, profesi, dan minat di lingkungannya masing-masing. Harapan kita dari semua kegiatan itu, para pemuda dapat melakukan refleksi diri, menginventarisasi tantangan yang dihadapi pemuda saat ini dan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang serta menetapkan langkah-langkah antisipasi masalah-masalah kepemudaan di masa mendatang.

Dalam melakukan refleksi diri ini para pemuda harus mampu menempatkan tonggak-tonggak sejarah yang menunjukkan kesuksesan perjuangan pemuda di masa lalu pada proporsi dan kurun waktunya. Hal ini dimaksudkan agar pemuda masa kini tidak memberikan bobot nilai yang berlebihan

*Staf CSIS.

pada semua kesuksesan itu sehingga timbul keinginan untuk membanggakan kesuksesan itu semata dan lupa memikirkan tata cara dan strategi untuk menghadapi tantangan pemuda kini dan di masa datang. Pemuda bukanlah kelompok orang yang mengagung-agungkan masa lampau sehingga tenggelam dalam nostalgia, tetapi adalah orang yang berusaha mengenal masa lampau dengan maksud untuk mengetahui keadaan pemuda masa kini dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Inilah makna refleksi diri bagi pemuda.

Pemuda yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sekelompok manusia yang berusia sekitar 15-30 tahun. Dalam kurun usia seperti ini tantangan yang dihadapi oleh para pemuda adalah sebagai berikut: (1) kesempatan kerja, bagi mereka yang telah tamat atau drop out dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Pertama; (2) kesempatan untuk memperoleh tempat di Perguruan Tinggi bagi para pemuda yang ingin melanjutkan studinya; dan (3) wadah sebagai sarana pembinaan dan pengembangan diri untuk menjadi anggota masyarakat yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya serta berperan dalam proses pembangunan negara bangsa. Tantangan dimaksudkan sebagai suasana kehidupan dalam masyarakat yang tidak memberikan peluang kepada pemuda untuk mewujudkan diri sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Tulisan ini mencoba menelaah tantangan itu dan mencoba memberikan jawaban terhadap tantangan itu berupa hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pemuda.

KESEMPATAN KERJA

Kesempatan kerja mempunyai kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari angkatan kerja. Keseimbangan di antara penawaran dan permintaan tenaga kerja menunjukkan tingkat daya serap kesempatan kerja. Makin tinggi daya serap kesempatan kerja yang ada berarti semakin besar jumlah pencari kerja mendapat pekerjaan. Hal ini berarti memperkecil jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (menganggur). Sedangkan apabila daya serap kesempatan kerja semakin kecil jumlahnya maka jumlah angkatan kerja yang menganggur akan semakin besar. Sebagai contoh kita lihat keadaan angkatan kerja di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tahun 1985. Menurut perhitungan tahun 1985 angkatan kerja yang terdaftar sedang mencari pekerjaan berjumlah 2.476.219 orang. Kesempatan kerja yang ada sebanyak 2.367.052. Ini berarti ada 109.167 orang tenaga kerja yang tidak mendapat pekerjaan (akan menganggur). Sisa tenaga kerja yang belum mendapat kesempatan kerja tahun 1984 sebanyak 100.809 orang. Dengan demikian jumlah tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan yang terdaftar di DKI Jaya tahun 1985 sebesar 209.976 orang. Di samping itu tentu masih ada angkatan kerja yang tidak terdaftar di DKI Jaya ini, yang jumlahnya mungkin jauh lebih besar daripada angkatan kerja yang terdaftar.

Kesempatan kerja yang terbuka untuk menampung pencari kerja meliputi beberapa sektor, yaitu: (1) sektor pemerintah, berupa penerimaan menjadi pegawai negeri dan anggota ABRI; (2) sektor industri; (3) sektor pembangunan proyek-proyek pemerintah dan swasta; (4) sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan; (5) pengiriman tenaga kerja ke luar negeri melalui proyek Antar Kerja Antar Negara (AKAN); dan (6) sektor kewiraswastaan yang meliputi perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan kegiatan-kegiatan informal lainnya.

Sektor pemerintah menyediakan kesempatan kerja yang sangat sedikit jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh formasi yang ada telah terisi semuanya, sehingga pengangkatan pegawai baru hanya untuk mengisi pegawai negeri yang pensiun atau meninggal dunia. Di samping itu berdasarkan pengamatan sementara di beberapa departemen/instansi pemerintah terlihat adanya kelebihan tenaga kerja, sehingga mereka hanya bekerja sungguh-sungguh dalam waktu yang terbatas dan sisa waktunya dipergunakan untuk santai bersama teman-temannya. Terjadilah pengangguran terselubung atau setengah pengangguran. Mengingat sektor ini menjadi pilihan pertama para pencari kerja dan proses masuknya biasanya berdasarkan pada koneksi dan "uang pelicin" maka dapat diperkirakan bahwa jumlah tenaga kerja yang setengah menganggur atau penganggur terselubung di sektor ini akan terus bertambah setiap tahun.

Pertumbuhan industri-industri sejak Pelita I sampai dengan Pelita III cukup menggembirakan para pencari kerja. Daya serap tenaga kerja di sektor ini diperkirakan sekitar 10-15% angkatan kerja kita. Ini berarti sektor ini menempati urutan ketiga dalam hal daya serap tenaga kerja setelah sektor pertanian (50%) dan sektor jasa kemasyarakatan (23-30%). Memasuki tahun 1980-an negara maju dilanda oleh resesi ekonomi. Resesi ini menyebabkan mereka mengurangi atau untuk sementara tidak membeli barang-barang produksi/komoditi yang diekspor oleh negara-negara sedang berkembang. Akibatnya pertumbuhan dan perkembangan industri di negara sedang berkembang termasuk Indonesia mengalami stagnasi, karena harus menurunkan jumlah produksi. Usaha untuk menjaga industri tidak jatuh pailit, beberapa industri seperti tekstil, otomotif, elektronika, kayu lapis, dan timah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tindakan ini berarti memperpanjang barisan para pencari kerja (penganggur). Dengan tindakan PHK ini maka harapan bahwa sektor industri akan menampung banyak tenaga kerja akan semakin sulit untuk menjadi kenyataan.

Sektor pembangunan proyek-proyek pemerintah dan swasta juga membuka kesempatan kerja baru bagi para pencari kerja. Tenaga kerja yang bekerja di proyek-proyek pada umumnya waktu kerja mereka ditentukan oleh

saat mulai dan berakhirnya pembangunan proyek. Ikatan kerja mereka dengan para kontraktor proyek bersifat sementara, maksudnya selama ada proyek yang dikerjakan. Setelah proyek-proyek yang ditangani oleh kontraktor itu selesai dikerjakan tenaga kerja itu dilepaskan dan mereka kembali menjadi pencari kerja. Sebagai contoh dapat disebutkan PT Civa, sebuah perusahaan kontraktor di Bogor yang mem-PHK sejumlah tenaga kerjanya dengan alasan pembangunan proyek-proyek sudah selesai.

Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan sektor yang masih memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi. Di sektor pertanian masalahnya adalah sempitnya tanah untuk bertani. Sensus Penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa di antara 17,5 juta keluarga petani di Pulau Jawa, terdapat 11 juta keluarga petani yang mengusahakan kurang dari 0,5 ha per keluarga. Sempitnya tanah pertanian ini menyebabkan tingkat setengah pengangguran di desa-desa Pulau Jawa cukup tinggi. Akibatnya terjadilah urbanisasi. Perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota ini menimbulkan masalah baru di kota, yaitu memperbanyak jumlah pencari kerja yang berusaha untuk merebut kesempatan kerja yang sangat sedikit. Karena itu apabila di desa mereka masih tergolong dalam setengah penganggur maka di kota mereka akan menjadi penganggur penuh. Sedangkan di sektor perkebunan, perikanan dan peternakan lainnya masih dalam proses pengadaan sehingga belum banyak menyerap tenaga kerja.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri seperti tenaga kerja wanita dan pria ke Timur Tengah, Serawak, dan Brunei Darussalam belum banyak membantu memecahkan masalah tenaga kerja di Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri masih sedikit sekali. Tenaga kerja kita yang dikirim ke luar negeri tidak memiliki ketrampilan-ketrampilan khusus sesuai dengan kebutuhan negara penerima tenaga kerja. Apalagi tingkat pendidikan formal tenaga kerja kita relatif masih rendah. Karena itu mereka sulit bersaing dalam merebut pasaran kerja dengan tenaga kerja dari negara yang lain. Usaha Departemen Tenaga Kerja untuk mendidik tenaga kerja kita di Balai Latihan Kerja dengan ketrampilan-ketrampilan khusus patut dihargai dan didukung sepenuhnya. Di samping itu pemerintah juga mengadakan pengiriman tenaga kerja antar daerah. Maksudnya daerah-daerah yang kelebihan tenaga kerja mengirimnya ke daerah-daerah lain di wilayah negara ini yang memerlukan tenaga kerja. Realisasi dari proyek ini tidak tampak. Apakah proyek transmigrasi juga merupakan salah satu perwujudan dari program pengiriman tenaga kerja ini?

Sektor kewiraswastaan, yang meliputi usaha dagang, jasa kemasyarakatan dan usaha-usaha informal lainnya merupakan medan usaha yang memberikan kesempatan kerja yang luas. Usaha di sektor informal sangat beraneka-ragam,

seperti pedagang kali lima, pedagang keliling, membuka warung, sebagai tukang cukur, sebagai tukang sepatu, tukang loak, dan beberapa jenis usaha rumah tangga seperti pembuat tempe, tahu, kue, es mambo, tukang jahit, tenun, serta kerajinan tangan lainnya. Kegiatan usaha sektor informal ini umumnya sederhana, modalnya kecil, tidak memiliki izin usaha sehingga untuk memulai usaha ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan memulai suatu usaha formal seperti mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Yang perlu dimiliki oleh seorang yang bekerja di sektor informal adalah kemauan untuk bekerja keras, kemampuan untuk mengelola modal dan setiap keuntungan yang diperoleh tidak dihabiskan tetapi diinvestasikan, bersikap hemat dan kreatif.

Namun demikian sektor yang terakhir ini sangat kurang menarik perhatian para pencari kerja. Mereka lebih senang memilih menganggur daripada memulai suatu usaha di sektor informal. Kesempatan kerja yang dicarinya adalah di sektor formal meskipun mereka mengetahui bahwa daya serap tenaga kerja di sektor itu sangat sedikit. Suasana inilah yang menantang pemuda untuk memberikan jawabannya. Pemuda sebagai bagian terbesar dari angkatan kerja yang berusia antara 15-30 tahun, berpendidikan menengah atau tinggi, yang mencari pekerjaan untuk pertama kali, dan belum memiliki ketrampilan tambahan atau pengalaman kerja.

KESEMPATAN MEMPEROLEH TEMPAT DI PERGURUAN TINGGI

Setiap tahun ajaran baru, kita selalu mengalami kenyataan bahwa besarnya jumlah lulusan SLTA yang ingin melanjutkan pelajarannya ke perguruan tinggi tidak sebanding dengan jumlah tempat yang tersedia, baik di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Oleh karena itu setiap akhir masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri ataupun swasta, jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan untuk pertama kalinya bertambah besar. Penambahan jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan setiap tahunnya juga tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia terutama di sektor kerja yang formal. Akibatnya jumlah pengangguran, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan masih terus berusaha mencari pekerjaan akan meningkat.

Oleh karena itu perluasan kesempatan memperoleh pendidikan di perguruan tinggi perlu diupayakan oleh pemerintah secara sungguh-sungguh. Salah satu upaya pemerintah yang telah dilaksanakan saat ini adalah pembukaan Universitas Terbuka. Perhatian yang sungguh-sungguh perlu diberikan pada pengembangan Universitas Terbuka ini, sehingga terbentuklah masyarakat belajar di tanah air ini. Sebab apabila kemauan masyarakat un-

tuk belajar ini dapat tersalurkan secara baik melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, maka pada saatnya kita dapat mengharapkan akan timbul satu masyarakat yang kreatif, dinamis, dan mampu menghasilkan nilai tambah.

Selain itu pengembangan pendidikan non-formal seperti yang dikemukakan oleh Menteri P dan K, Prof.Dr. Fuad Hassan, perlu benar-benar dilaksanakan. Sebab dengan pendidikan non-formal ini angkatan kerja lulusan SLTA atau yang drop out dapat memperoleh pengetahuan tentang ketrampilan sesuai dengan minat dan pilihannya. Pengembangan pendidikan non-formal ini juga dimaksudkan agar mata pelajaran ketrampilan tidak perlu masuk ke dalam kurikulum sekolah umum. Dengan demikian di sekolah-sekolah umum pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilaksanakan secara lebih intensif. Pengembangan sekolah menengah kejuruan seperti STM, SPG, SMKK, SMEA dan lain-lainnya perlu juga dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga setiap siswa tamatan sekolah kejuruan benar-benar menguasai ketrampilan kejuruannya dan siap memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan ketrampilan kejuruannya itu.

Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian dan tanggapan dari pemerintah adalah keluhan masyarakat bahwa perguruan tinggi swasta itu mahal. Selain uang sumbangan yang dipungut pada saat pertama kali masuk di perguruan tinggi swasta, perbedaan besarnya uang kuliah per tahun antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sesuai dengan jenis fakultas rata-rata berkisar di antara 1:20. Maksudnya apabila uang kuliah setahun di perguruan tinggi negeri Rp100,00, maka di perguruan tinggi swasta sudah menjadi Rp2.000,00. Oleh karena itu perguruan tinggi swasta hanya menjadi tempat belajar bagi para mahasiswa yang berasal dari lapisan masyarakat yang tergolong dalam ekonomi kuat. Disadari bahwa perguruan tinggi swasta juga mempunyai alasan tersendiri dan kuat untuk melakukan hal tersebut. Semua biaya penyelenggaraan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi swasta ditanggung oleh yayasan penyelenggaranya sendiri. Pemerintah belum dapat memberikan bantuan berupa subsidi kepada perguruan tinggi swasta selain pengawasan dalam pengakuan status.

Mengingat pentingnya peranan pendidikan tinggi umumnya dalam proses pengembangan sumberdaya manusia ini maka pengembangannya perlu dilakukan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah ataupun masyarakat luas yang menaruh perhatian pada pendidikan, khususnya dunia usaha sebagai pemakai tenaga kerja. Politeknik perlu dikembangkan di semua perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi swasta yang berkemampuan dapat mendirikan politekniknya. Sehingga dengan demikian perguruan tinggi juga menghasilkan tenaga kerja trampil. Selain itu pembinaan tenaga-tenaga manajer yang ber-

kemampuan mengelola suatu usaha perlu ditangani juga oleh pemerintah melalui pembukaan akademi-akademi manajemen negeri. Hingga saat ini akademi seperti itu kebanyakan dikelola oleh badan-badan swasta sehingga biayanya yang harus dikeluarkan oleh calon mahasiswa sangat mahal.

Kenyataan kurangnya jumlah tempat yang tersedia di perguruan tinggi negeri, mahalnya tempat kuliah di perguruan tinggi swasta, kurangnya jumlah pendidikan terminal tingkat perguruan tinggi (politeknik, akademi) yang dikelola oleh pemerintah merupakan tantangan yang perlu juga dicarikan jawabannya oleh pemuda. Pemuda sebagai bagian dari angkatan kerja perlu mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan ketrampilan melalui lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti itu. Dengan keahlian dan ketrampilan itu pemuda kita dapat menjadi tenaga kerja yang produktif dan mampu menghasilkan nilai tambah dari suatu jenis pekerjaan.

Mengapa kesempatan untuk memperoleh pendidikan di tingkat perguruan tinggi bagi pemuda perlu mendapatkan perhatian? Jawabannya adalah sebagai berikut. *Pertama*, pemuda sebagai bagian dari angkatan kerja perlu memiliki tingkat keahlian dan ketrampilan tertentu, sehingga mampu melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia baik sebagai individu ataupun anggota masyarakat. Dengan kemampuan ini diharapkan para pemuda mampu menciptakan pekerjaan sendiri sehingga mampu memberi pekerjaan kepada orang lain, dan bukan hanya sebagai tenaga kerja yang mencari pekerjaan pada orang lain. *Kedua*, pemuda sebagai kader bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Apabila kita menoleh ke belakang sejenak untuk melihat para pemuda pelopor pergerakan (Angkatan 1908, 1928) dan para pemuda pencetus kemerdekaan (Angkatan 1945), kita dapat mengatakan bahwa mereka umumnya adalah pemuda-pemuda yang terdidik pada masanya. Mereka umumnya telah memperoleh pendidikan formal pada jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu sudah seharusnya para pemuda kita memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

Hal ini menjadi lebih penting artinya lagi apabila kita mampu mengantisipasi ke masa depan. Perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi industri, teknologi komunikasi dan informasi yang sedemikian cepat menuntut dari kita, terutama para pemudanya, untuk menempatkan diri secara benar dalam proses perkembangan ini. Untuk itu pemuda harus membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi. Pemuda yang diharapkan akan menjadi pemimpin di masa depan harus mulai membina diri saat ini juga melalui jenjang pendidikan formal yang terendah sampai yang

tertinggi. Sehingga dengan demikian di masa depan akan timbul generasi pemimpin baru yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

WADAH PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA

Disadari bahwa dewasa ini wadah pembinaan dan pengembangan pemuda sudah ada dan bahkan ada kesan bahwa sudah terlalu banyak. Ada wadah pembinaan dan pengembangan pemuda yang dibentuk oleh pemerintah seperti KNPI, Karang Taruna, Pramuka, PKK, dan AMPI; ada organisasi pemuda yang di masa lalu dikenal dengan organisasi massa seperti Pemuda Katolik, Pemuda Ansor, dan lain sebagainya; ada organisasi mahasiswa ekstra-universiter seperti PMKRI, HMI, GMNI, GMKI, dan PMII; ada organisasi intra-universiter seperti Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK), Senat Mahasiswa, Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis, dan BPM. Ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), KUKMI, dan organisasi fungsional serta profesional pemuda lainnya.

Masalahnya, adalah apakah semua organisasi pemuda telah menjalankan fungsi/perannya secara benar dan optimal dalam membina dan mengembangkan potensi pemuda, sehingga benar-benar menjadi riil dan para pemuda mampu menolong dirinya sendiri. Jumlah pemuda yang sangat besar dalam struktur kependudukan kita apabila dapat dibina dan digunakan sebagai tenaga kerja produktif merupakan modal pembangunan yang besar. Dewasa ini kita lihat hampir semua organisasi pemuda yang memiliki program-program pembinaan dan pengembangan pemuda hanyalah merupakan dokumen tertulis yang akan menjadi bahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap konperensi/kongres pemuda dan bukan untuk dilaksanakan secara benar dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu para pemuda merasa bahwa semua organisasi pemuda yang ada tidak mampu memecahkan masalah yang menantang pemuda saat ini, seperti sempitnya kesempatan kerja, kurangnya kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi, tidak ada ketrampilan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada, tidak ada modal untuk memulai suatu usaha, dan tidak ada dana yang dapat dipakai untuk membiayai pendidikan di tingkat yang lebih tinggi.

Semua masalah itu perlu dipecahkan oleh para pemuda secara nasional. Pemerintah telah menaruh perhatian yang besar terhadap masalah pemuda. Hal ini terlihat dengan adanya Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga. Pemerintah telah membangun Graha Pemuda sebagai tempat para pemuda mendiskusikan dan memecahkan masalah pemuda. Rupanya sampai saat ini semua itu belum berjalan seperti yang diharapkan dan seharusnya terlaksana. Rupanya hingga saat ini kita belum mempunyai kebijaksanaan nasional ten-

tang kepemudaan yang menyeluruh dan terpadu. Kebijakan yang mampu memecahkan masalah kepemudaan saat ini dan mampu mengantisipasi masalah kepemudaan di masa depan.

GBHN 1983 tentang Generasi Muda telah memberi arah pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai kader pembangunan negara bangsa. Masalahnya adalah bagaimana ketentuan dalam GBHN itu dituangkan dalam satu kebijaksanaan nasional tentang kepemudaan. Bersumberkan pada kebijaksanaan itu disusun rencana kerja, program-program kerja yang operasional dan dapat dilaksanakan sehingga terasa manfaatnya oleh pemuda di seluruh wilayah tanah air kita. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat kebanyakan pemimpin organisasi pemuda saat ini hanya dapat berbicara dengan bahasa slogan dan semboyan-semboyan yang muluk-muluk tetapi tidak terwujud dalam karya nyata. Kegagalan proyek desa pemuda, transmigrasi pemuda, merupakan petunjuk bahwa kita belum memiliki kebijaksanaan nasional tentang kepemudaan, yang dalam tahap perencanaan dan penyusunan programnya dilakukan secara terpadu dengan instansi pemerintah lainnya.

PENUTUP

Pemuda harus mampu memberikan jawaban terhadap tantangan yang dihadapinya saat ini dan di masa depan. Pemuda Angkatan 1908, 1928, telah berhasil menghadapi tantangan terhadap pemerintahan kolonial dan mampu menyatakan kemerdekaan serta mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemuda Angkatan 1945 mampu mempertahankan kemerdekaan negara bangsa dalam perang kemerdekaan dan melakukan kegiatan mengisi kemerdekaan melalui pelaksanaan pembangunan nasional secara berencana dan bertahap. Oleh karena itu pemuda yang menyebut dirinya Angkatan '66 ataupun sesudahnya harus mampu menjamin pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf hidup rakyat secara berkesinambungan.

Dalam proses pembangunan ini telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Perubahan itu terjadi akibat pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga turut mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakatnya. Perubahan yang terjadi itu menuntut kepada para pemuda dan generasi muda umumnya untuk menguasai ketrampilan-ketrampilan sehingga mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara konstruktif dan sesuai dengan kebutuhan sosial. Oleh karena itu para pemuda dalam menjawab tantangan pembangunan sekarang ini ataupun di masa yang akan datang harus mulai dengan membina diri sendiri, yaitu dengan jalan membaca dan belajar.

Agar hal ini dapat terwujud maka sarana dan prasarana untuk membaca dan belajar ini perlu disediakan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah cq. Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga yang menjalin kerjasama dengan Menteri P dan K, Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi, dan Menteri Transmigrasi. Kerjasama ini perlu diatur dalam satu koordinasi yang fungsional dan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Hingga saat ini masalah koordinasi kerjasama di lingkungan departemen-departemen pemerintahan tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan dan sulit terwujud dalam pelaksanaan kerja nyata.

Sambil menunggu perwujudan kerjasama antar departemen pemerintah ini para pemuda melalui organisasi-organisasi pemuda yang ada membangun masyarakat informasi melalui karya nyata pemuda, yaitu mendirikan perpustakaan pemuda sampai di tingkat desa. Sebab hanya pemuda yang memiliki kesadaran dan minat untuk membaca dan belajar adalah pemuda yang mampu menjawab tantangannya secara kritis dan konstruktif.